



Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, Kabupaten Badung

Ni Nyoman Pramesti Dewi^{*a}, Ni Putu Anik Prabawati^a, Juwita Pratiwi Lukman^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: pramestidewi452@gmail.com

Abstract

Toddler Family Development is a program in Quality Family Villages in the context of fostering families to realize optimal growth and development of toddlers. Penarungan Village uses Toddler Family Development activities as a form of community group empowerment with the aim of improving the quality of the community starting from an early age. This research aims to determine community empowerment through Toddler Family Development activities in the Quality Family Village, Penarungan Village, Badung Regency. The problem study uses Community Empowerment theory indicators from Mardi Yatmo Hutomo (2000). The type of research used is descriptive qualitative. Informants were determined using purposive and snowball sampling techniques. Data was collected through interviews, observation and documentation which was then analyzed using data analysis techniques from the Miles and Huberman model. The research results show that the empowerment of community groups through Toddler Family Development activities in the Quality Family Village of Penarungan Village has gone well but is not yet fully optimal. The Penarungan Village Government needs to make clarity regarding the details of APBDes funding for the Quality Family Village program. Apart from that, there is a need to increase a cadre's self-confidence, which can be done through intensive training and mentoring, as well as positive support from the surrounding environment.

Keywords: Empowerment, Quality Family Development, Quality Family Village

Abstrak

Bina Keluarga Balita merupakan suatu program di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal. Desa Penarungan menjadikan kegiatan Bina Keluarga Balita sebagai suatu bentuk pemberdayaan kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang dimulai dari usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, Kabupaten Badung. Pengkajian masalah menggunakan indikator teori Pemberdayaan Masyarakat dari Mardi Yatmo Hutomo (2000). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data dari model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan telah berjalan baik namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Desa Penarungan, perlu membuat kejelasan mengenai rincian dana APBDes untuk program Kampung Keluarga Berkualitas. Selain itu, perlu adanya peningkatan kepercayaan diri seorang kader yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif, serta adanya dukungan positif dari lingkungan sekitar.

Kata kunci : Pemberdayaan, Bina Keluarga Berkualitas, Kampung Keluarga Berkualitas

PENDAHULUAN

Agenda Prioritas Pembangunan NAWACITA merupakan program yang diusulkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan tujuan untuk menekankan pentingnya arah menuju Indonesia yang memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan identitas budaya yang kuat sebagai prioritas (Kominfo.go.id, 2015). Dalam upaya mencapai Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tugas dan tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberi dukungan untuk mencapai Agenda Prioritas Pembangunan NAWACITA, terutama fokus pada poin agenda 3 dan 5. Agenda 3 menekankan pada penguatan daerah-daerah dan desa untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan. Sementara Agenda Nomor 5 berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta implementasi dimensi pembangunan manusia dalam sektor kesehatan dan aspek

mental/karakter (Revolusi Mental). Calman (1993) mendefinisikan kualitas hidup yaitu perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan dirinya, berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan.

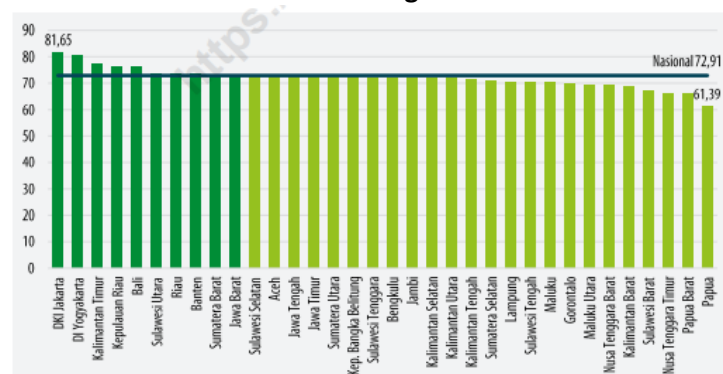
Menindaklanjuti tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merealisasikan kegiatannya di lapangan melalui program yang disebut Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program tersebut direalisasikan untuk mengatasi permasalahan kependudukan di dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Permasalahan yang memerlukan perhatian khusus yaitu ketidakmajuan dalam mencapai sasaran program dan penurunan kinerja pelaksanaan program KKBPK di lapangan. Berdasarkan evaluasi internal dan petunjuk dari Presiden Republik Indonesia, disarankan untuk mendirikan Kampung Keluarga Berencana sebagai langkah inovatif yang bertujuan untuk melaksanakan program KKBPK secara menyeluruh di lapangan.

Program Kampung Keluarga Berencana pertama kali diinisiasi pada tahun 2016, dengan desain yang memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berencana tersebut. Kampung Keluarga Berencana merupakan konsep miniatur yang mencakup seluruh aspek program KKBPK dan melibatkan berbagai bidang di lingkungan BKKBN, dengan kerjasama erat dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, pemangku kepentingan, serta instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat (BKKBN, 2016). Implementasi Kampung Keluarga Berencana akan dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah di seluruh Kabupaten/Kota.

Kampung Keluarga Berencana mengalami perubahan nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas setelah diterbitkannya surat edaran Mendagri Nomor 843.4/2879/SJ tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas pada 15 April 2020. Perubahan ini dipicu oleh kurang optimalnya pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana (BKKBN, 2023). Selanjutnya, dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas. Instruksi Presiden tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan, dan memperkuat lembaga keluarga melalui optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Langkah ini merupakan bagian dari Agenda Prioritas Pembangunan NAWACITA. Dengan Instruksi Presiden ini, diharapkan implementasi kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dapat mencapai tingkat optimal. Ini diharapkan menjadi suatu inisiatif bersama di tingkat desa/kelurahan yang dijalankan secara terpadu dan bersinergi dalam pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan mempertimbangkan semua aspeknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (Badan Pusat Statistik, 2009). Hubungan yang erat terdapat antara kualitas penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia, karena Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan gambaran keseluruhan kualitas hidup manusia di suatu negara. Secara faktual, tingkat kualitas penduduk dapat tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Umumnya, negara-negara yang memiliki penduduk berkualitas tinggi juga menunjukkan tingkat IPM yang tinggi. Masyarakat yang memiliki kesehatan dan pendidikan yang baik cenderung mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2022 di setiap provinsi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. menggambarkan bahwa masih terdapat beberapa provinsi yang tergolong dibawah Indeks Pembangunan Manusia Nasional atau di bawah 72,91. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, langkah ini perlu diambil tidak hanya oleh provinsi-provinsi yang berada di bawah IPM Nasional, tetapi juga harus diterapkan oleh semua provinsi, dengan tujuan mencapai penduduk yang memiliki kualitas yang lebih baik.

Program Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya fokus pada pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Ini disebabkan oleh peran krusial dan nilai strategis keluarga dalam mendukung pembangunan yang sukses dan bermutu, sekaligus sebagai penyumbang utama sumber daya manusia berkualitas. Prinsip pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas adalah berbasis masyarakat, dengan tujuan untuk memajukan pembangunan komunitas. Pemerintah memberikan dukungan dan insentif kepada masyarakat, yang kemudian berperan aktif dalam proses pengelolaan dan bertanggung jawab atasnya. Pendekatan Kampung Keluarga Berkualitas dimulai dari tingkat desa/kelurahan dengan pendekatan yang terintegrasi, dengan keyakinan bahwa ini akan memperkuat pemberdayaan dan institusi keluarga serta masyarakat dalam semua aspek, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2016, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dilakukan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas yang sebelumnya dikenal sebagai Kampung Keluarga Berencana. Langkah tersebut diambil dengan tujuan mencapai keserasian dan keterpaduan antar pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pembangunan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau wilayah yang setara. Kabupaten Badung terdiri dari 6 kecamatan, di mana setiap kecamatan telah memiliki Kampung Keluarga Berkualitas. Berikut merupakan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Badung.

Tabel 1. Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah Kampung KB
1	Kuta	2
2	Kuta Selatan	5
3	Kuta Utara	3
4	Mengwi	15
5	Abiansemal	18
6	Petang	7

Sumber : Webstie BKKBN

Desa Penarungan yang terletak di Kabupaten Badung merupakan salah satu contoh Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Bali. Kampung KB di Desa Penarungan mulai dicanangkan pada tanggal 13 Maret 2016. Pencanangan Kampung KB ini secara resmi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam suatu upacara yang diadakan di Wantilan Pura Dalem Jati, Desa Pakraman Penarungan (Berita Satu, 2016). Desa Penarungan ditetapkan sebagai Kampung KB melalui disahkannya SK Bupati Badung Nomor 1514/03/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016. Desa Penarungan dipilih untuk dijadikan Kampung KB dikarenakan pada saat pembentukannya yakni tahun 2016, Desa Penarungan tergolong kategori desa yang miskin di Kabupaten Badung. Pada tahun 2019, Desa Penarungan mengikuti perlombaan Kampung KB dan memperoleh juara 3 sebagai Percontohan Kampung KB Nasional (Wawancara Bersama Perbekel Desa Penarungan, 2023).

Aktivitas yang dilakukan di Kampung KB tidak hanya sebatas pada isu Keluarga Berencana, melainkan juga mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas masyarakat. Terdapat 8 seksi di Pokja Kampung KB Desa Penarungan yaitu : (a) seksi keagamaan; (b) seksi sosial dan budaya; (c) seksi cinta dan kasih sayang; (d) seksi perlindungan; (e) seksi reproduksi; (f) seksi sosial pendidikan; (g) seksi ekonomi; (h) seksi pembinaan lingkungan. Kedelapan seksi tersebut memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun program yang dijalankan di Kampung KB Desa Penarungan yaitu Kegiatan Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia

(BKL). Selain itu terdapat program lainnya yakni Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Sekretariat Kampung KB, dan Rumah Dataku. Berikut merupakan jumlah keluarga yang tergabung dalam kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) :

Tabel 2. Jumlah Keluarga Dalam Kegiatan Tribina Tahun 2023

No	Kegiatan	Jumlah
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	225 keluarga
2	Bina Keluarga Remaja (BKR)	539 keluarga
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	336 keluarga

Sumber : Wawancara Bersama Perbekel Desa Penarungan

BKB atau Bina Keluarga Balita merupakan suatu program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal, BKB ini tidak sama dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau pun TPA karena sasaran dari BKB adalah keluarga/orang tua yang memiliki anak balita usia 0-5 tahun. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kelompok / wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja. Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan (Poktan) keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Kegiatan Tribina di Desa Penarungan, belum terlaksana secara menyeruluruh di semua banjar yang ada, terkecuali pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB) yang sudah terlaksana di seluruh banjar di Desa Penarungan. Sedangkan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) baru terlaksana di Banjar Umahanyar, Banjar Cemenggon, Banjar Bangkiangsidem, Banjar Dauh Peken, dan Banjar Dangin Peken. Dan Bina Keluarga Lansia (BKL) telah terlaksana di Banjar Umahanyar, Banjar Cemenggon, Banjar Sengguan, dan Banjar Blungbang.

Pada awal pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Penarungan tahun 2016, program Bina Keluarga Balita (BKB) hanya dilakukan di satu banjar yaitu banjar Umahanyar. Jumlah keluarga yang merupakan anggota BKB pada saat itu hanya 39 keluarga. Pada tahun 2023, program BKB telah terlaksana di seluruh banjar yang ada di Desa Penarungan dengan total anggota 225 keluarga. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan dalam mengkaji program Bina Keluarga Balita di Desa Penarungan. Hal tersebut dikarenakan program Bina Keluarga Balita (BKB) telah terlaksana di seluruh banjar yang ada di Desa Penarungan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya (a) Kurangnya kemandirian kader dalam melaksanakan penyuluhan; (b) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menerapkan pola pengasuhan anak; (c) Kurangnya pemahaman terkait pola makan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita; (d) Penerapan perilaku hidup yang bersih dan sehat masih kurang.

Dalam rangka mengetahui pelaksanaan dari sebuah program pemberdayaan, diperlukan indikator yang menjelaskan pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Menurut Mardi Yatmo Hutomo (2000: 7-10) menjelaskan praktik dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu : (a) bantuan modal; (b) bantuan pembangunan prasarana; (c) bantuan pendampingan; (d) penguatan kelembagaan; (d) penguatan kemitraan. Menurut Parsons (1994 : 49) pemberdayaan menitikberatkan bahwa seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memiliki pengaruh terhadap kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Berdasarkan pemaparan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, Kabupaten Badung.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan jawaban tentang suatu fenomena atau pertanyaan dengan menerapkan prosedur ilmiah secara sistematis dan menyajikannya secara naratif (Yusuf, 2019:329). Penelitian kualitatif umumnya tidak melibatkan pembentukan hipotesis yang perlu diuji, melainkan lebih berfokus pada pertanyaan penelitian yang memandu pengumpulan data secara langsung. Fokus penelitian kualitatif terletak pada makna dan deskripsi yang umumnya disampaikan dalam bentuk kata-kata dibandingkan angka-angka. Adapun jenis

penelitian deskriptif ialah penelitian yang menyajikan gambaran spesifik mengenai situasi ataupun permasalahan (Neuman, 2017:44).

Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penulis ingin memberikan gambaran rinci tentang permasalahan yang sedang dibahas. Dalam konteks penelitian ini, penulis tidak melakukan manipulasi terhadap kondisi sosial yang menjadi objek penelitian, melainkan membiarkan objek penelitian berjalan sesuai keadaannya. Metode penelitian deskriptif kualitatif menjadi penting dalam penelitian ini karena mampu menjabarkan secara spesifik dan sistematis mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung menggunakan dua sumber data, yaitu; data primer dan sekunder.

Unit analisis merujuk pada satuan yang sedang diteliti, yang dapat berupa individu, kelompok, objek, atau konteks peristiwa sosial tertentu, seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Sugiyono, 2016). Dalam kerangka penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah analisis individu. Adapun unit analisis yang termasuk dalam penelitian ini yakni terdiri dari Perbekel Desa Penarungan, Ketua Kampung KB Desa Penarungan, dan masyarakat Desa Penarungan. Unit analisis tersebut dipilih karena memiliki peran sebagai stakeholders yang mengetahui program pemberdayaan masyarakat Desa Penarungan melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

Pemilihan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara maksimum (Sugiyono, 2013). Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel data dengan beberapa pertimbangan tertentu (Martono, 2010). Pertimbangan yang dilakukan seperti memilih informan yang paling berpengaruh ataupun informan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi terkait permasalahan penelitian. Adapun *snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mulanya berjumlah sedikit kemudian sampel tersebut berkembang menjadi semakin banyak (Martono, 2010:19).

Teknik penyajian data merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir untuk menggambarkan kesimpulan dari hasil penelitian (Samsu, 2017:106). Teknik ini diterapkan untuk menyajikan data yang telah dihimpun dan dianalisis dengan lebih jelas dan efektif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Sumaryadi, 2005:11). Pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat diberikan alat, pengetahuan, dan dukungan yang memungkinkan mereka mengambil peran aktif dalam pengelolaan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan membuka peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan. Keseluruhan proses ini menciptakan suatu lingkungan di mana masyarakat bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh dan berkembang, meraih kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui bagaimana proses dari kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan berjalan dengan optimal, maka diperlukan sebuah indikator pembedah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima (5) indikator pemberdayaan menurut Mardi Yatmo Hutomo (2000).

Tabel 3. Hasil Temuan

Indikator	Hasil Temuan
Bantuan Modal	Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan BKB di Kampung KB Desa Penarungan bersumber dari APBDes dan tidak ada bantuan modal atau dana dari pihak lain. Dana tersebut digunakan untuk honor kader dan Pemberian Makanan Tambahan kepada balita.
Bantuan Pembangunan Prasarana	Pemerintah Desa Penarungan telah menyiapkan prasarana yang mencakup fasilitas fisik dan pendukung lainnya, seperti alat-alat posyandu, permainan edukasi, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta penggunaan bale banjar sebagai tempat pelaksanaan kegiatan .
Bantuan Pendampingan	BKKBN memiliki peranan penting sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan BKB di Kampung KB Desa Penarungan. BKKBN menyampaikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai aspek-aspek penting terkait kesehatan dan perkembangan balita serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pendampingan tersebut tentunya sangat membantu para kader yang masih tidak percaya diri dalam menyampaikan materi saat sosialisasi.
Penguatan Kelembagaan	Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Desa Penarungan menjadi lembaga utama yang bertujuan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, memperkuat program, serta menyediakan akses informasi dan pembelajaran. Salah satu upaya penguatan kelembagaan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan rapat rutin Pokja,
Penguatan Kemitraan	Adanya kerjasama antara Pemerintah Desa, Puskesmas, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Disdukcapil, terbentuk kerja sama yang erat dalam menyediakan layanan dan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Komunikasi yang efektif menjadi dasar penting dalam menjaga hubungan antar semua pihak yang terlibat, memastikan kelancaran program dan pelayanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun hasil analisis yang ditemukan dalam pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan yang mengacu pada Teori Pemberdayaan oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000: 7-10) yang memiliki lima (5) indikator yakni bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan.

Bantuan Modal

Bantuan modal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian utama, hal tersebut dikarenakan jika tidak ada bantuan modal berupa dana maka masyarakat kurang mampu untuk berkembang dan pelaksanaan kegiatan pun akan terhambat. Dana yang digunakan dalam kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan bersumber dari APBDes tanpa adanya bantuan dana dari pihak lain seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dana atau modal yang dialokasikan untuk Kegiatan Bina Keluarga Balita diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Penarungan. Dana ini merupakan bagian dari Dana Pembinaan Kemasyarakatan. Total dana yang digunakan pada tahun 2023 mencapai Rp. 10.719.152.769,00, termasuk dalamnya adalah untuk berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap

tentang penggunaan dana tersebut serta kegiatan pembinaan yang telah dianggarkan dan direalisasikan, berikut disajikan informasi melalui baliho yang berisikan APBDes Desa Penarungan tahun 2023.

Gambar 4.6 Baliho Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Penarungan Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISWA (Rp.)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAFTAR	143.200.000,00	46.250.000,00	38.900.000,00
1.2	PENDAPATAN TRANSYER	22.076.222.307,00	25.307.368.834,00	1.768.368.373,00
1.3	PENDAPATAN LAIN	86.000.000,00	126.587.187,00	42.551.507,40
1.4	JUMLAH PENDAPATAN	22.255.222.307,00	25.683.555.021,00	1.785.356.880,40
2	PEMBELAJAN			
2.1	BIAYA PENDIDIKAN PERANGKAT DAFTAR	5.994.334.654,29	4.076.374.648,27	1.476.768.673,73
2.2	BIAYA PENDIDIKAN PERANGKAT DAFTAR	2.852.736.438,00	2.822.172.856,00	2.224.857.798,44
2.3	BIAYA PENDIDIKAN PERANGKAT DAFTAR	73.888.818.740,80	75.719.152.768,00	2.349.788.027,88
2.4	BIAYA PENDIDIKAN PERANGKAT DAFTAR	679.512.000,00	641.458.288,00	227.363.750,00
2.5	BIAYA PENDIDIKAN PERANGKAT DAFTAR	223.442.638,21	146.546.338,00	63.293.334,21
2.6	JUMLAH BELANJA	25.458.236.900,79	18.223.387.489,27	7.234.531.420,22
2.7	SURPLUS (DEFISIT)	(3.183.000.602,79)	2.356.576.591,83	(5.451.577.154,62)
3	PENYERAPAN			
3.1	PENYERAPAN PERANGKAT DAFTAR	2.852.736.438,00	2.822.172.856,00	0,00
3.2	PENYERAPAN PERANGKAT DAFTAR	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
3.3	JUMLAH PENYERAPAN	3.183.000.602,79	3.183.000.602,79	0,00
3.4	SURPLUS (DEFISIT)	0,00	5.451.577.154,62	(5.451.577.154,62)

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2024

Bantuan dana dari APBDes digunakan untuk membayar honor kader dan untuk pemberian Makanan Tambahan (PMT), yang keduanya menjadi elemen penting dalam menjaga kelancaran dan efektivitas kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Besaran nominal honor untuk setiap kader yaitu Rp.50.000 perbulan yang biasanya para kader melakukan kegiatannya sekali dalam sebulan. Setiap banjar memiliki 7 orang kader sehingga honor yang diberikan pada setiap banjar dalam sebulan yaitu Rp.350.000. Sehingga dana APBDes yang dikeluarkan setiap bulan untuk honor kader yaitu sebesar Rp. 3.850.000. Sedangkan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tidak memiliki anggaran khusus.

Modal atau dana dari APBDes menjadi elemen kunci dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan BKB di Desa Penarungan. Transparansi dalam penggunaan dana ini memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung kesuksesan program pemberdayaan. Transparansi penggunaan dana APBDes disalurkan melalui rapat desa dan dapat dilihat pula pada baliho yang dibuat mengenai penggunaan dana APBDes.

Bantuan Pembangunan Prasarana

Melalui upaya menciptakan sarana dan prasarana yang optimal, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, tetapi juga menyediakan kemudahan akses yang diperlukan untuk setiap langkah dalam proses pemberdayaan tersebut. Bantuan prasarana yang diberikan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa Penarungan. Hal ini termasuk fasilitas

fisik dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan dalam upaya pemberdayaan kelompok masyarakat melalui program tersebut. Dengan adanya dukungan prasarana tersebut, diharapkan kegiatan BKB dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Prasarana yang disediakan mencakup berbagai fasilitas penting seperti permainan edukasi, alat-alat posyandu (seperti timbangan, pengukur lingkar kepala, dan pengukur tinggi badan balita), serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) seperti bubur kacang hijau, pisang telur, dan biskuit kepada balita. Selain itu, tempat pelaksanaan kegiatan BKB juga telah dipersiapkan dengan memanfaatkan bale banjar yang dimiliki oleh setiap banjar. Para kader posyandu juga tidak luput dari perhatian, dimana mereka diberikan baju kostum dan honor sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.

Ibu Perbekel Desa Penarungan, Ni Wayan Kerni, yang menegaskan kesiapan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan BKB. Ia menyebutkan bahwa alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan BKB telah dipersiapkan dengan baik, termasuk pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala balita, serta pemberian PMT dan permainan edukasi. Tidak terdapat kendala yang menghambat penyediaan fasilitas tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan BKB dapat berjalan dengan lancar.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Penarungan telah memberikan dukungan yang signifikan dalam menyediakan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan BKB. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan dan perkembangan anak-anak di Desa Penarungan.

Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemberdayaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang kurang berdaya dapat lebih berdaya sehingga dapat secara mandiri mengembangkan potensi yang ada. Tugas utama dari seorang pendamping ialah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator serta melakukan monitoring berkala untuk kelompok pemberdayaan masyarakat tersebut agar terciptanya pemberdayaan yang mampu memberdayakan masyarakat dan menjadikan masyarakat tersebut mandiri. Dengan demikian, pada pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan telah menerima kegiatan pendampingan dan pelatihan.

Bantuan pendampingan memiliki peran signifikan dalam mendukung pemahaman kader posyandu terhadap konsep kegiatan Bina Keluarga Balita. Dengan adanya pendamping, kader posyandu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang kemudian dapat disosialisasikan kepada orang tua yang menghadiri kegiatan posyandu. Kerjasama dengan BKKBN Kabupaten Badung juga sangat penting dalam mendukung kegiatan Bina Keluarga Balita, di mana mereka berperan dalam mengevaluasi tumbuh kembang anak. Meskipun demikian, keberadaan pihak BKKBN tidak selalu terjadi dalam setiap kegiatan, terutama jika kader posyandu telah mendapatkan pelatihan yang memadai.

Selain itu, pihak BKKBN juga memberikan pelatihan kepada kader posyandu terkait kesehatan, gizi, dan tumbuh kembang balita. Namun, masih terdapat kader yang merasa malu dalam menyampaikan materi tersebut. BKKBN turut serta langsung dalam kegiatan posyandu dan Bina Keluarga Balita untuk memantau dan membantu dalam proses sosialisasi. Dampak dari pendampingan yang diberikan oleh BKKBN juga dirasakan oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan ibu tertentu pada tanggal 25 Februari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa BKKBN Kabupaten Badung aktif dalam memberikan bantuan pendampingan kepada kader posyandu, tidak hanya dalam hal penyuluhan materi, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

BKKBN Kabupaten Badung menunjukkan komitmen yang tinggi dengan turun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai aspek-aspek penting terkait kesehatan dan perkembangan balita. Melibatkan orang tua dalam kegiatan Bina Keluarga Balita menjadi strategi yang efektif karena memungkinkan adanya interaksi langsung dan tanya jawab antara BKKBN dan orang tua, sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, terutama para orang tua yang memiliki balita.

Penguatan Kelembagaan

Adanya kelembagaan di tengah-tengah masyarakat merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan memiliki fungsi untuk memfasilitasi masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam mengakses bantuan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kelembagaan juga berperan sebagai media diskusi, wahana refleksi, dan akses kemitraan. Dengan demikian, pada pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan memiliki fokus lembaga yakni Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Desa Penarungan.

Pokja di Kampung KB bertujuan untuk membantu proses pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan pelaksanaan program, serta memudahkan akses informasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Demi memperkuat kelembagaan, pihak pemerintah desa melakukan rapat rutin dengan Pokja setiap bulan untuk membahas pelaksanaan program dan memberikan arahan agar program-program tersebut dapat berjalan lebih optimal. Pokja memiliki peran penting dalam menjalankan program Kampung KB, dengan adanya 8 seksi yang memiliki peran dan tugas masing-masing. Diharapkan keberadaan Pokja dapat memastikan kegiatan Kampung KB berjalan terstruktur dan lebih baik.

Pokja di Desa Penarungan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan program-program yang telah dirancang. Penguatan kelembagaan menjadi langkah krusial dalam memperkuat kinerja Pokja, baik dari segi kapasitas individu maupun perbaikan struktur organisasi dan koordinasi internal. Diharapkan, melalui upaya penguatan kelembagaan yang terarah, Pokja dapat menjadi entitas yang lebih responsif dan adaptif dalam menjawab dinamika perubahan lingkungan desa, serta memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat di program Kampung Keluarga Berkualitas.

Penguatan Kemitraan

Penguatan kemitraan dalam sebuah pemberdayaan merupakan hubungan erat antara pihak yang memiliki kekuatan atau sumber daya yang beragam dengan pihak yang mungkin memiliki sumber daya yang lebih terbatas. Melalui kolaborasi mitra, kedua belah pihak akan saling mendukung dengan baik. Adanya kemitraan yang solid antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga non-pemerintah, memiliki potensi untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Penarungan dalam kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Perbekel Desa Penarungan, Ibu Ni Wayan Korni, saat ini kemitraan dalam kegiatan Bina Keluarga Balita melibatkan Puskesmas, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Disdukcapil. Terdapat kerjasama lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas ini, yang terlihat dari peran aktif masing-masing entitas dalam memastikan keberhasilan program, termasuk pemastian anak-anak memiliki akta kelahiran, BPJS kesehatan, dan Kartu Identitas Anak.

Kerjasama antara Pemerintah Desa Penarungan, Puskesmas, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Disdukcapil telah terjalin secara efektif dan sesuai dengan peran masing-masing entitas. Keberhasilan dalam menjalankan kemitraan ini sangat didukung oleh komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang lancar dan transparan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa program-program atau kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sinergi antar lembaga ini bukan hanya kerjasama formal, tetapi sebuah upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di Desa Penarungan. Pernyataan ini sejalan dengan komentar dari Ketua Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, Bapak I Ketut Guna Sulaeman, yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam memahami peran masing-masing dan mengatasi potensi hambatan yang mungkin timbul.

Pemerintah Desa Penarungan telah memilih strategi memperkuat kemitraan melalui upaya menjalin komunikasi yang efektif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan saluran terbuka dan aktif untuk pertukaran informasi, baik mengenai ide-ide positif maupun kendala-kendala yang mungkin muncul. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk sinergi antara pemerintah desa dan mitra-mitra potensial, menciptakan lingkungan kerja sama yang lebih kokoh dan berkesinambungan untuk kemajuan bersama.

Rekomendasi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan

Pada penelitian yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, Kabupaten Badung dilakukan untuk melihat bagaimana proses dari terlaksananya pemberdayaan kelompok masyarakat melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita yang sudah berjalan di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dengan menggunakan indikator pembedah. Hal tersebut bertujuan agar nantinya ketika ditemukan sebuah kelemahan pada proses pelaksanaannya, peneliti mampu memberikan sebuah masukan dan saran untuk pengoptimalan pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan.

Setelah melakukan observasi dan analisis, pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan masih terdapat beberapa kekurangan sehingga membuat peneliti memberikan rekomendasi yang berkesinambungan dengan kekurangan yang ada, diantaranya adalah :

1. Diperlukan adanya kejelasan mengenai rincian dana dari APBDes untuk mendukung kegiatan Bina Keluarga Balita secara konsisten, sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Penarungan. Apabila terdapat rincian dana yang jelas dari APBDes untuk kegiatan BKB, maka penyelenggara program dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan yang sesuai dengan anggaran dana yang telah disediakan, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan diri seorang kader dalam menyampaikan materi, diperlukan pendekatan yang berfokus pada peningkatan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi para kader melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif. Selain itu, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan dukungan moral serta penguatan positif kepada para kader dapat membantu mereka mengatasi rasa malu dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan materi dengan lebih percaya diri dan efektif. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi faktor ini akan memastikan bahwa kader dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam mendukung kesuksesan program Bina Keluarga Balita di Desa Penarungan.
3. Membuat strategi-strategi baru. Untuk keberlanjutan dari adanya pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya strategi dan inovasi baru dalam mengembangkan pemberdayaan tersebut. Peran Pokja Kampung KB Desa Penarungan dan para kader diperlukan dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah disajikan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan telah berjalan baik namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan. Faktor tersebut adalah ketidakpastian akan nominal dana yang pasti dari APBDes untuk program Kampung KB khususnya kegiatan Bina Keluarga Balita dan kader yang merasa malu atau tidak percaya diri dalam menyampaikan materi, serta tidak adanya inovasi baru. Adapun hasil analisis pemberdayaan menurut Mardi Yatmo Hutomo (2000: 7-10) sebagai berikut :

1. Bantuan Modal

Bantuan modal atau dana yang telah diberikan pemerintah Desa Penarungan yang bersumber dari APBDes dan merupakan bagian dari Dana Pembinaan Kemasyarakatan. Dana sebesar Rp. 3.850.000 perbulan untuk

honor kader di 11 banjar yang ada di Desa Penarungan. Sedangkan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta fasilitas lainnya tidak memiliki rincian khusus. Seluruh dana yang dikeluarkan untuk kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) hanya bersumber dari APBDes, dengan kata lain tidak ada bantuan dana dari pihak lainnya. Penggunaan APBDes tersebut ditransparansikan ke masyarakat melalui rapat desa dan melalui baliho.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Dukungan prasarana yang mencakup fasilitas fisik dan pendukung lainnya, seperti alat-alat posyandu, permainan edukasi, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta penggunaan bale banjar sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, telah disiapkan dengan baik oleh Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan kesiapan dan komitmen pemerintah desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program Bina Keluarga Balita. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan kegiatan BKB dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan dan perkembangan anak-anak di Desa Penarungan.

3. Bantuan Pendampingan

Dalam kegiatan Bina Keluarga Balita, pendamping memfasilitasi proses belajar dan refleksi, bertindak sebagai mediator, serta melakukan pemantauan berkala untuk memastikan tercapainya pemberdayaan yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan BKKBN Kabupaten Badung juga penting dalam mendukung kegiatan ini, khususnya dalam evaluasi tumbuh kembang anak. Meskipun tidak selalu hadir dalam setiap kegiatan, kehadiran BKKBN memberikan kontribusi signifikan, baik dalam penyuluhan materi maupun interaksi langsung dengan masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, BKKBN menunjukkan komitmen tinggi dalam menyediakan bantuan pendampingan yang berdampak positif bagi masyarakat Desa Penarungan.

4. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan memegang peranan krusial dalam pemberdayaan masyarakat, seperti yang terlihat dalam kegiatan Bina Keluarga Balita di Desa Penarungan. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Desa Penarungan menjadi lembaga utama yang bertujuan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, memperkuat program, serta menyediakan akses informasi dan pembelajaran. Melalui rapat rutin dan pembagian tugas yang terstruktur, Pokja menjalankan perannya secara efektif dalam mengelola program Kampung KB. Penguatan kelembagaan Pokja menjadi langkah penting dalam memastikan kinerja yang responsif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan desa. Diharapkan, dengan keberadaannya, Pokja dapat memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Penarungan.

5. Penguatan Kemitraan

Penguatan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Penarungan telah memainkan peran kunci dalam meningkatkan efektivitas program-program seperti Bina Keluarga Balita. Melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa, Puskesmas, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Disdukcapil, tercipta sinergi yang kuat dalam menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk masyarakat. Komunikasi yang baik menjadi pondasi utama dalam menjaga hubungan antarpihak yang terlibat, memastikan kelancaran program dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Strategi memperkuat kemitraan melalui komunikasi efektif menjadi pilihan cerdas Pemerintah Desa untuk menciptakan lingkungan kerja sama yang berkelanjutan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama di Desa Penarungan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, bahwa terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat melalui kegiatan Bina Keluarga Balita. Saran tersebut diantaranya :

1. Saran untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sebaiknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memperhatikan kembali mengenai dana atau modal untuk program Kampung Keluarga Berkualitas salah satunya kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Penting untuk memperhatikan alokasi anggaran khusus untuk program BKB guna memastikan tersedianya dana yang memadai untuk pendampingan, pelatihan kader, dan pengadaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.

2. Saran untuk Pemerintah Desa Penarungan

Sebaiknya Pemerintah Desa Penarungan melakukan penetapan anggaran khusus yang jelas dan pasti untuk kegiatan BKB dalam setiap siklus anggaran APBDDes. Hal ini akan memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut telah dialokasikan secara memadai dan terinci. Selain itu, lakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan BKB untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.

3. Saran untuk Kader

Para kader yang terlibat dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) memegang peran penting dalam menyampaikan materi kepada masyarakat. Agar para kader lebih percaya diri dan tidak merasa malu dalam menyampaikan materi terkait BKB, disarankan agar seluruh kader mengikuti pelatihan dan pembekalan secara intensif terkait dengan materi yang akan disampaikan. Dengan pemahaman yang kuat terhadap topik, para kader akan lebih percaya diri saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, latihan langsung atau simulasi penyampaian materi di hadapan kelompok kecil dapat membantu para kader merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berbicara di depan umum. Dengan dukungan, latihan, dan pemahaman yang cukup, diharapkan para kader dapat menyampaikan materi terkait Bina Keluarga Balita dengan percaya diri dan efektif kepada masyarakat.

4. Saran untuk Masyarakat Desa Penarungan

Kepada masyarakat yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Penarungan, saran dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini yaitu diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan BKB, seperti hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap sesi kegiatan, baik itu diskusi, penyuluhan, maupun praktik-praktik yang diselenggarakan. Manfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru seputar penerapan pola asuh anak, pola makan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita serta penerapan perilaku hidup. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi mengenai hal-hal yang belum dipahami terkait perawatan dan pemenuhan kebutuhan anak. Jika ada masukan, pertanyaan, atau kebutuhan yang ingin disampaikan, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan pemerintah desa atau pihak terkait. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik dapat membantu perbaikan dan pengembangan program BKB yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

Antara News Bali. (2016). Desa Penarungan Percontohan Kampung KB Nasional Dievaluasi. Diakses pada 28 September 2023 dari <https://bali.antaranews.com/berita/99417/desa-penarungan-percontohan-kampung-kb-nasional-dievaluasi>

Anwas, O.M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Asrar, M. A dkk. (2020). Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pelaksanaan Program Kampung KB Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 101-114.

BKKBN. Kampung Keluarga Berkualitas. Diakses pada 12 September 2023 dari <https://kampungkb.bkkbn.go.id/>

Ibrahim, A. H. H. dkk. Implementation of Quality Family Village Program to Enhance Family Welfare in Moya Village, Central Ternate Subdistrict.

- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
- Kominfo.go.id. (2015). Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat. Diakses pada 26 September 2023 dari <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>
- Malik Ruslan, A. W. (2006). *Pemikiran Prof. Dr. Haryono Suyono. Pemberdayaan Masyarakat : Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis dan Berbudaya*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mardika, I.N. (2016). Puan Maharani Canangkan Kampung KB di Badung, Bali. Diakses pada 28 September 2023 dari <https://www.beritasatu.com/news/354599/puan-maharani-canangkan-kampung-kb-di-badung-bali>
- Moelong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo : Cakra Books
- Nurbalqis, A., Poti, J., & Subiyakto, R. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 109-116.
- Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Purnomo, D., dkk. (2022). Strategic Solution Model Revitalization of the Role of Actor Network in Accelerating Stunting Rate Reduce in “Quality Family (KB)” Villages, Salatiga City. *Influence: International Journal Of Science Review*, 4(3), 102-125.
- Satori, Komariah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- SK Bupati Badung Nomor 1514/03/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Badung Tahun 2016
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : CV. Budi Utama
- Timisela, N. R. dkk. (2023). Implementasi Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 572-576.
- Webster. (1986). *Webster's New International Dictionary*. Springfield, Mass.: Merriam-Webster Inc
- Wilson, T. (1996). *The Empowerment Mannual*. London: Grower Publishing Company.
- Yunus, S. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Kota Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Yusuf, A. Muri. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zubaedi. (2014). *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana,4.